



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.20/MEN/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah, perlu mengubah organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/ 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B.2394/M.PAN-RB/8/ 2012, tanggal 28 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB II A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A
SATUAN KERJA

Pasal 10A

- (1) SUPM dapat membentuk satuan kerja nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

2. Judul BAB V diubah dan ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat 8 (delapan) SUPM yang berlokasi di :
 1. Ladong, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 2. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Kota Agung, Provinsi Lampung;
 4. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 5. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Waiheru, Ambon, Provinsi Maluku; dan
 8. Sorong, Provinsi Papua Barat.
- (2) Wilayah Kerja masing-masing SUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1033

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hanung Cahyono', written over the stamp.

Hanung Cahyono

LAMPIRAN
 5
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER. 20/MEN/2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
 USAHA PERIKANAN MENENGAH

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

NO.	SUPM	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	SUPM Ladong	Ladong, Nangroe Aceh Darusalam	a. Provinsi Nangroe Aceh Darusalam; dan b. Provinsi Sumatera Utara.
2.	SUPM Pariaman	Pariaman, Sumatera Barat	a. Provinsi Sumatera Barat; b. Provinsi Riau; c. Provinsi Kepulauan Riau; dan d. Provinsi Jambi.
3.	SUPM Kota Agung	Kota Agung, Lampung	a. Provinsi Sumatera Selatan; b. Provinsi Bengkulu; c. Provinsi Lampung; d. Provinsi Bangka Belitung; e. Provinsi Banten; f. Provinsi DKI Jakarta; dan g. Provinsi Jawa Barat.
4	SUPM Tegal	Tegal, Jawa Tengah	a. Provinsi Jawa Tengah; b. Provinsi D.I. Yogyakarta; c. Provinsi Jawa Timur; d. Provinsi Bali; e. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan f. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	SUPM Pontianak	Pontianak, Kalimantan Selatan	a. Provinsi Kalimantan Barat; b. Provinsi Kalimantan Timur; c. Provinsi Kalimantan Tengah; dan d. Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	SUPM Bone	Bone, Sulawesi Selatan	a. Provinsi Sulawesi Selatan; b. Provinsi Sulawesi Tengah; c. Provinsi Sulawesi Barat; d. Provinsi Sulawesi Utara; e. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan f. Provinsi Gorontalo.

NO.	SUPM	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	SUPM Waeheru	Waeheru, Ambon	a. Provinsi Maluku; dan b. Provinsi Maluku Utara.
8.	SUPM Sorong	Sorong, Papua Barat	a. Provinsi Papua; dan b. Provinsi Papua Barat.

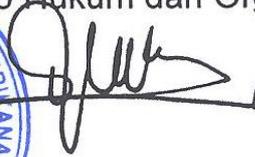
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono